

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan wewenang Camat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang berpedoman pada Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Kepada Camat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan pemantauan terhadap bangunan-bangunan yang berdiri tanpa IMB, bangunan yang tidak sesuai dengan IMB, dan bangunan yang menyalahi peruntukan IMB dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Selama tahun 2018 Kecamatan Lubuk Bagaluang telah mengeluarkan 86 surat teguran dan Kecamatan Padang Timur sebanyak 43 surat teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Izin Mendirikan Bangunan. Dengan begitu, pengawasan dan pengendalian IMB yang dilakukan oleh Camat belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih didapati pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan tim pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan wewenang Camat dalam pengawasan dan pengendalian Izin mendirikan bangunan di Kota Padang yaitu:

- a. Jumlah pengawas yang sedikit dan kurang berkompetensi di bidang arsitektur dan bangunan.
- b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan menambah jumlah tim pengawas yang berkompeten dibidang arsitektur dan bangunan sehingga mampu mengawasi semua bangunan-bangunan yang ada di Kecamatan serta mampu mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan.
2. Diharapkan agar setiap Kecamatan mengadakan sosialisasi mengenai Izin Mendirikan Bangunan sehingga masyarakat mengetahui pentingnya Izin Mendirikan Bangunan yang kemudian akan mendorong masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan.
3. Dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Kepada Camat dikarenakan sudah tidak relevan lagi dengan satuan kerja perangkat daerah saat ini serta tidak mengatur batasan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan yang dilimpahkan kepada Camat.